



## **DAMPAK POLITIK ETIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Valentino Manalu<sup>1</sup>, Santha Sepatya Hotmaria Pasaribu<sup>2</sup>, Samuel Butar-butur<sup>3</sup>, Rosmaida Sinaga<sup>4</sup>**  
**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia<sup>1234</sup>**

**valentinomanalu98@gmail.com<sup>1</sup>, santhapasaribu13905@gmail.com<sup>2</sup>, samuelsasuke1509@gmail.com<sup>3</sup>, rosmaidasinaga@gmail.com<sup>4</sup>**

Accepted: Dec, 21<sup>st</sup> 2024 Published: Jan, 20<sup>th</sup> 2025

### **Abstract**

This research discusses Dutch colonialism in the Indonesian education system. How does colonialism play a role in Indonesian education, especially ethical politics, influencing the education system in Indonesia. Dutch colonialism in Indonesia lasted for more than three centuries, with an impact on various aspects of the life of the people of the Republic of Indonesia, one of which included the education system. Education is an effort made to change or develop attitudes, behavior, personal potential, intelligence in a better direction through the learning process. This research aims to determine the role of colonialism in the education system in Indonesia, starting with ethical politics. This research article uses a qualitative analysis method, specifically with literature analysis. According to (Safitri & Anggreani Dewi, 2021) This method is carried out by analyzing data from secondary sources of research articles related to the problems discussed in this research.

**Key words:** *Colonialism, Ethical Politics, Education System.*

**How to Cite:** Manalu. V., Pasaribu. S. S. H., Butar-butur. S., Sinaga. R. (2024) Dampak Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (119-125)

\*Corresponding author:  
valentinomanalu98@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)  
ISSN 2684-9607 (Online)

## INTRODUCTION

Negara tercinta Republik Indonesia merupakan negara yang dijajah se-abad lebih lamanya. Salah satu penjajahan yang berada di Indonesia yaitu kolonialisme. Kolonialisme ialah salah satu jenis penjajahan yang ada di Indonesia, khususnya kolonialisme Belanda.

Kolonialisme Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 dengan menjajah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda mengalami keruntuhan ekonomi setelah pemisahan Belgia pada tahun 1830. Hal ini menyebabkan Belanda semakin tertinggal dari Inggris dalam bidang industri. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan satu kebijakan yaitu Politik Etis. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk terjajah, dengan fokus pada perbaikan kondisi kehidupan material, khususnya di bidang pendidikan. Politik etis secara resmi dimulai setelah dibacakannya pidato Ratu Belanda, menandai dimulainya era baru dalam masyarakat Indonesia (Nasution, 1983: 15).

Kebijakan Politik etis merupakan salah satu kebijakan yang digagas oleh penjajah Belanda pada abad ke-20, dan perkembangannya merupakan kebijakan baru yang berpedoman pada kemajuan bangsa Indonesia. Politik Etis juga merupakan tonggak sejarah yang berfokus pada pendidikan. Keinginan masyarakat Belanda terhadap politik etis yang mereka sampaikan kepada bangsa Indonesia yang berada dalam posisi lemah adalah adil. Menguatnya rasa harga diri dan individualisme di kalangan elit baru Indonesia yang berpendidikan Barat sebenarnya berarti terus merosotnya martabat, yang berujung pada merosotnya kekuasaan pemerintah adat (Van Niel, Robert, 1984: 58).

Kemerdekaan Indonesia dapat ditelusuri kembali ke pendidikan yang diterimanya dan upaya para intelektual dan individu terpelajar yang berjuang untuk kemerdekaan, mendiskreditkan kebodohan kolonialis, dan meningkatkan nasionalisme Indonesia. Hal ini juga erat kaitannya dengan

lahirnya kaum intelektual dan berpendidikan yang kemudian bersatu da memperjuangkan serta mem-propagandakan kemerdekaan dan merombak kebodohan atas penjajahan yang ada. Tidak semua masyarakat Indonesia akan memiliki akses terhadap pendidikan di Indonesia, namun setidaknya dapat memberikan dampak positif. Politik etis mengacu pada pendidikan formal, yang salah-satunya fokus pada pendidikan.

Lahirnya tokoh-tokoh besar yang lahir dari lulusan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan Barat. Pendidikan dengan artian kebutuhan mendasar suatu bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Di abad ke-20 pendidikan merupakan kelanjutan dari abad sebelumnya dan berkembang sangat pesat terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas. Meskipun Program Politik etis ditujukan untuk pengembangan pendidikan Barat bagi masyarakat bumiputra, namun pada kenyataannya program ini merupakan program yang tidak sengaja menanamkan rasa nasionalis yang meneruskan sistem yang dikembangkan menurut sistem yang telah lama mempengaruhi sistem pendidikan tradisional.

Penulis melihat latar belakang lahirnya proses pembentukan sistem politik yang baru, yaitu Politik Etis, maka penulis ingin menganalisis dan mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan dari Politik Etis pada abad 20 serta dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya Sistem politik Etis

## METHODOLOGY

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan yang mudah dipahami dan sistematis untuk menyampaikan dengan jelas tujuan penulisan ini sebagai alat penulisan untuk mendukung penulisan ini. Peran kebijakan politik etis dalam sistem pendidikan Indonesia akan dijelaskan melalui metode analisis kualitatif, khususnya analisis literatur (literature review).

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berkembang secara alami dan banyak digunakan dalam berbagai bidang keilmuan seperti bidang ilmu sosial, bidang

budaya, bidang psikologi, bidang komunikasi, dan bidang pendidikan (Nugrahani & Hum, 2014). Isi jurnal dan sumber informasi, dan dengan meninjau sumber-sumber ini, isi dokumen dianalisis dan dipahami dengan cermat, menyeluruh dan kritis, memungkinkan membantu pembaca memahami isi dan maknanya. Pembaca bisa mendalami lebih dalam dengan Jurnal ini.pembahasan isi jurnal ini.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **1. Awal Kebijakan Politik Etis Terhadap Pendidikan**

Meskipun pendidikan telah dikembangkan di Indonesia sebelum kebijakan politik etis diberlakukan, kebijakan ini secara signifikan meningkatkan dan memperluas aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat pribumi. Sebelumnya, pemerintah kolonial sangat bergantung pada tenaga kerja mahal yang diimpor dari Eropa. Maka pemerintah membuka sekolah bagi penduduk setempat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja modern dengan upah terjangkau.

Pada awal abad ke-20, dengan diterapkannya *Etische Politiek* (politik etis) yang dianggap membuka perbedaan pandangan mengenai pendidikan, pada saat dirumuskan, para intelektual, politikus, dan politikus Belanda namun ketika dirumuskan memberikan dampak pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi dan Ulama politisi (lingkaran gereja).Meskipun pendidikan sudah ada di Hindia Belanda pada abad ke-19, kebijakan politik etis memperkuat sistem pendidikan di Indonesia.

Meski terdapat perbedaan pendapat di parlemen Belanda, beberapa partai politik mendukung program tersebut. Mereka memandang hal ini sebagai “kemanusiaan” atau bahkan “kewajiban moral” terhadap negara Indonesia.Meskipun Kode Etik kontroversial, namun sebenarnya mulai berlaku setelah Ratu Wilhelmina memberikan pidato kepada Jendral Staten pada tahun 1901. Sebelum tahun 1901, politik Belanda

hanya mementingkan kebutuhan ekonomi, dan eksploitasi kekayaan Indonesia namun tidak melihat dan memikirkan rakyat Indonesia.

Pidato Ratu Wilhelmina berhasil mendamaikan unsur kolonialisme dengan unsur “kewajiban moral”. Penjelasan Van Deventer tentang politik etis dipahami dalam kaitannya dengan irigasi, pendidikan, dan imigrasi. Dalam buku *Kolonialisme: Eksploitasi dan Eksploitasi untuk Hegemoni* (2019) karya Miftakudin disebutkan bahwa pelatihan awal hanya ditujukan kepada kaum bangsawan dan diselenggarakan oleh raja dan pengawalnya di sekitar keraton dan di pesantren.

Namun, kolonialisme dan intervensi politik Belanda menyebabkan pembangunan sekolah. Sekolah yang dibangun seperti SD adalah *Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs* (MULO) untuk SMP dan *Algemeen Metdelbare School* (AMS) untuk SMA. Berikutnya adalah *Technical Hoogere School* (THS) Bandung, *School tot Opleiding Van Indien Artsen* (STOVIA), *Medical School and Legal Hoogere School* (RHS), atau Fakultas Hukum Batavia. Pendirian sekolah-sekolah ini karena kebutuhan Belanda akan tenaga sipil, medis, dan militer. Sejak saat itu, hanya laki-laki dari kalangan bangsawan yang diperbolehkan bersekolah. Pada era pergerakan nasional, mereka mulai fokus pada pendidikan mandiri dan mendirikan sekolah adat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan niat baik pemerintah Belanda.

Kelas 6, Kelas 3, Kelas 3 merupakan salah satu contoh warisan tak benda pemerintah kolonial Belanda yang memberikan dampak positif bagi negara Indonesia melalui pembangunan sekolah dan penerapan kebijakan timbal balik pemerintah Hindia Belanda.

Dampak positif bagi warga negara Indonesia antara lain: Peningkatan pendidikan formal. 1.Mengurangi jumlah buta huruf pribumi profesional di Hindia Belanda, 2.Kehadiran sekolah sangat penting dalam mengembangkan perannya dalam perluasan

sistem pendidikan Hindia Belanda. Website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbud) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi buta huruf. Anda akan dibayar rendah. Dampak positif yang dicapai bersifat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Dimana orang-orang terpelajar dan terpelajar melahirkan Kelompok-kelompok ini mengancam pemerintah Belanda. Dengan munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam. Bahkan tokoh-tokoh ini berjasa besar dalam perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Pada tahun 1900, sekolah untuk priyayi dan masyarakat umum didirikan hampir merata di seluruh wilayah. Siswa Bumiputera tidak membedakan suku, ras, agama, maupun perbedaan. Sebagai bumiputera yang tertindas, mereka merasa lebih dilibatkan. Perjuangan ini terjadi dalam suatu gerakan nasional yang dihipunkan oleh para intelektual. Tujuan utama Politik Etis dalam pendidikan adalah meningkatkan kemampuan SDM rakyat Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk bekerja dalam pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah untuk masyarakat pribumi, yang kemudian melahirkan kaum terdidik pribumi. Pendidikan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan masyarakat pribumi, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam perekonomian dan pemerintahan colonial.

## **2. Dampak Politik Etis dalam Sistem pendidikan di Indonesia**

Politik Etis yang mulai dijalankan pada awal abad ke-20 terfokus pada tiga program besar, yakni:

### **1) Pengairan (Irigasi):**

Tujuan dari program ini adalah membangun sistem irigasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

Indonesia. Membangun waduk yang besar agar air hujan dapat ditampung dan dialirkan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, pemerintah sedang melanjutkan pembangunan infrastruktur terkait pertanian seperti kereta api. Keberadaan kereta api penting untuk mengangkut hasil pertanian dari pedalaman India ke pelabuhan dan menghindari pembusukan barang.

### **2) Transmigrasi**

Program tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kepadatan penduduk Indonesia dengan membangun pemukiman baru di Pulau Sumatera sebagai tempat relokasi masyarakat dari daerah padat penduduk. Program imigrasi ini didirikan pada tahun 1901 dan dimaksudkan untuk meringankan tekanan sosial dan ekonomi di daerah padat penduduk.

### **3) Pendidikan**

Program pendidikan merupakan inti dari Politik Etis. Pemerintah Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah untuk masyarakat pribumi, termasuk:

- Sekolah desa (Volkschool) : Sekolah untuk rakyat pribumi didesa, dengan pengajaran membaca, menulis dan berhitung
- Vervolgschool: Pendidikan yang bercorak Belanda yang disebut juga sekolah "peralihan "
- Sekolah kelas 1 dan kelas 2 : Sekolah yang didirikan hanya untuk anak bangsawan dengan menggunakan bahasa Belanda, kebanyakan berasal dari pulau Jawa dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa utamanya.
- HIS (Hollandsch Inlandshe School): Pergantian dari sekolah kelas 1, namun diperuntukkan untuk para Pribumi yang merupakan keturunan bangsawan dan orang kelas terpendang.
- ELS (Europeesche Lagere School): Dikhususkan bagi keturunan Belanda, Eropa dan elit Pribumi.
- Hollandsch Chinese school) : yaitu untuk keturunan Cina dan Belanda

- Mulo ( Meet Uitgebreid Lager Onderwijs: kelanjutan dari ELS yaitu Sekolah Menengah setelah menyelesaikan HIS. temukan tentang MULO dari Sukardjo & Komarudin, tahun 1903 di Indonesia dibuka kursus MULO yang disambut baik oleh kaum Indo-Eropa dan orang yang tak sanggup membayar HBS, yang dianggap mahal. Hal tersebut juga diperhitungkan lulusan MULO-nya dapat bekerja kekantor pemerintahan.
- AMS (Algemeene Middelbare School) : Sekolah menengah atas untuk siswa lulusan HBS dan MULO. Pendirian MULO sebagai kelanjutan dari segala macam sekolah rendah yang berorientasi Barat, dan khususnya HIS, adalah merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu sistem pendidikan yang lengkap di Indonesia. Pada langkah berikutnya terbuka AMS. Sekolah menengah atas adalah superstruktur MULO ini terbagi atas bagian mata pelajaran A yang lebih mengutamakan sastra dan sejarah dan bagian mata pelajaran B yang lebih mengutamakan matematika dan fisika. Lalu bagian A terbagi lagi menjadi A1 yang mengangkat Studi Klasik Timur dan bagian A2 yang mengangkat Studi Klasik Barat.
- HBS (Hoogere Burgerschool): Untuk orang-orang Eropa, Belanda, Tionghoa, dan Rakyat Pribumi Yang memiliki status sosial yang tinggi
- STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen): Sekolah kedokteran yang berada di Batavia, yang dikhususkan untuk Pribumi agar bisa menjadi Dokter. Merupakan jenjang perguruan tinggi
- NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) Sekolah kedokteran yang ada di Surabaya.
- THS (Technische Hoge School): kejuruan di bidang Teknik
- Kweekschool dan hogere Kweekschool: kejuruan dibidang keguruan

- OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambrenaren): lembaga untuk mendidik pamong pribumi.

Di Dalam aspek politik etis dibidang pendidikan, Belanda datang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan masyarakat yang kala itu disebut bumiputera. Pentingnya pengaruh dari belanda bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia edukasi dan akademik tepatnya di Hindia Belanda. Mulai tahun 1900, sekolah untuk priyayi dan masyarakat umum telah didirikan hampir merata di seluruh Jawa. Dalam hal ini, manfaatnya bagi warga setempat yaitu mereka berkesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 1940, ditemukan lebih dari 2 juta anak yang berbahasa ibu belajar di sekolah bahasa lokal, dan lebih dari 88.000 anak belajar di sekolah Belanda. Pernyataan ini memperlihatkan antusiasme yang besar kepada masyarakat sebelumnya dengan mengharapkan pendidikan yang bersifat tradisional seperti pesantren berencana berpaling ke pendidikan modern yang disediakan oleh pemerintah kolonial.

Dalam aspek politik etis dibidang pendidikan, Belanda menghasilkan modifikasi luar biasa pada dunia pendidikan masyarakat bumiputera. Pengaruhnya sangat penting bagi perkembangan dan perluasan dunia pendidikan dan akademik di Hindia Belanda. Sejak tahun 1900, sekolah untuk priyayi dan masyarakat umum telah didirikan hampir merata di seluruh Jawa. Dalam hal ini, manfaatnya bagi warga setempat ialah mereka mempunyai peluang besar untuk bersekolah. Pada tahun 1940, ditemukan lebih dari 2 juta anak yang berbahasa ibu belajar di sekolah bahasa lokal, dan lebih dari 88.000 anak belajar di sekolah Belanda.

Hal ini memperlihatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pendidikan tingkat tradisional seperti pesantren untuk beralih ke pendidikan yang disediakan belanda yaitu pendidikan modern. Kemajuan masyarakat pribu dalam bidang pendidikan dibawa oleh pendidikan barat, terutama dalam

hal munculnya kelas intelektual baru yang mempunyai pemikiran modern tetapi memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Di sisi lain, penerapan kebijakan politik etis juga menyebabkan respons permusuhan tentang adanya pendidikan tradisional Indonesia.

Hal ini menuai respon keras, khususnya respon kalangan pendidikan Islam. Sebab, penerapan kebijakan ini juga melibatkan kebijakan yang tidak populis demi kelangsungan pendidikan Islam, seperti yang akan dibahas nanti. Isi kebijakan tersebut dinilai lebih mengedepankan kepentingan pemerintah kolonial dibandingkan kepentingan bumiputera. Seiring berjalannya waktu, kecenderungan ke arah pendidikan Barat di sekolah-sekolah Belanda membawa progres bagi masyarakat pribumi, khususnya dalam hal munculnya kaum-kaum intelektual baru yang mempunyai pola pemikiran modern tetapi memiliki semangat nasionalisme kokoh.

Di samping itu juga Penerapan kebijakan politik etis juga menyebabkan respons spontan kepada realitas pendidikan tradisional Indonesia. Hal ini menuai banyak reaksi keras. Sebab, penerapan kebijakan politik etis juga melibatkan beragam kebijakan yang tidak populis demi kelangsungan pendidikan Islam yang pertama kali ada. Isi kebijakan tersebut dinilai lebih mengedepankan kepentingan pemerintah kolonial dibandingkan kepentingan bumiputera.

Dengan demikian, jika pada awal masa penjajahan Belanda sekolah adalah bentuk pendidikan eksklusif, atas perintah Gubernur Van Huyts pada awal abad ke-20, pendidikan mulai diberikan kepada masyarakat luas bentuk sekolah desa. Mereka yang belajar di sekolah tradisional mempunyai kesempatan untuk belajar di sekolah negeri. Hasilnya, sekolah didirikan di banyak tempat. Maksud mengatakan sekolah-sekolah desa dan sekolah dasar menawarkan biaya sekolah yang rendah, mata pelajaran praktis dan peluang kerja, meskipun hanya untuk manajemen tingkat rendah.

Dalam pemberlakuannya secara

langsung, kebijakan politik etis telah mencuatkan banyak pendapat yang memperlakukan berbagai penyimpangan dari tujuannya semula ketika ia pertama kali diberlakukan. Bahkan Elsbels Locher Scholten berpendapat bahwa kebijakan Politik Etis telah berubah menjadi "kebijakan yang bertujuan memperluas kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda menuju pemerintahan sendiri dibawah belanda menurut model Barat".

## CONCLUSION

Kita tahu bahwa Terlihat pendidikan tinggi memang sangat diprioritaskan dalam pendidikan kolonial Belanda. Politik etis menyoroti kekuatan dan kelemahan serta membuka perspektif berbeda mengenai Pendidikan. politik etis dalam program pendidikan telah menyebabkan terbentuknya banyak kelompok terpelajar yang berupaya mengubah sistem tata negara. Seiring semakin pentingnya pendidikan di Indonesia, lahirilah sosok terpelajar yang mulai mendobrak kebodohan.

Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan politik dan, dalam beberapa kasus, kemudian muncul organisasi-organisasi yang berkomposisi modern, seperti Budi Utomo. Organisasi ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat Indonesia dan mempersiapkan perubahan sosial dan politik di masa depan. Namun dalam praktiknya, politik etis telah menimbulkan banyak penafsiran, dengan berbagai tingkat penyimpangan dari tujuan awalnya ketika pertama kali dicanangkan. Menurut Elsbels Rocher Schoklten, politik etis ini sebenarnya adalah "kebijakan yang ditujukan pada pemerintahan mandiri ala Barat di kalangan Belanda dan perluasan kekuasaan Belanda di seluruh Hindia Belanda".

## REFERENCE LIST

- Sumanto, Wasty & F.X Soeyarno, (1983),  
Landasan Historis Pendidikan Indonesia,  
(Surabaya, Usaha Nasional)  
Scholten, Elsbeth Locher, (1996), Etika yang

- Berkeping-keping, (Jakarta: Jambatan)
- Nasution, (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Niel, R.V. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. In Solo: Cakra Books. [digilibfkip.univetbantara.ac.id](http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/).  
<http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Syarif, M. (2019), *Politik Etis pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren*
- Azra, Azyumardi, (2000) *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
- Maksum, (1999), *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
- Pramudiya, Muhammad Gusti, Dewi Salindri. 2015. *Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942*. Jurnal Publika Budaya Vol.1 (3) Maret 2015 Hal 20-34. Program Studi Ilmu Sejarah, Fak Sastar, Universitas Jember.
- Sultani, Magribi Ibrahimsyah Zofrano, dkk. 2020. *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20*. Jurnal Aretefak Vol.7 No. 2 Sep 2020 Hal 91-106. Universitas Galuh.